

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan gencarnya tuntutan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan nasional maupun daerah, maka pengukuran kinerja juga sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Salah satu organisasi sektor publik terbesar, pemerintah sudah semestinya menerapkan pengukuran kinerja secara berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2016). Dalam perkembangan sektor publik, fenomena yang banyak diamati adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Proses pelaporan keuangan sektor publik khususnya organisasi pemerintah daerah yaitu kepala bagian keuangan dan staf-staf keuangan terlibat secara langsung dalam penyusunan suatu pelaporan keuangan dalam kurung periode tertentu. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pengalaman dibidang akuntansi yang nantinya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Informasi yang

bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Penelitian ini mengembangkan dan mengacu pada penelitian Indrawati dan Djasuli (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)” dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi, waktu dan jumlah sampel yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan

pada OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih.

Berdasarkan peristiwa yang belakangan ini terjadi dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria yang merupakan informasi penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak baik individu maupun kelompok pengguna informasi. Fakta pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang terjadi merupakan sesuatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika dilihat lebih lanjut di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data-data yang disajikan tidak sesuai. Ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya dalam audit laporan keuangan pemerintah. Banyak temuan yang ditemukan pada pengelolaan keuangan yang disajikan oleh penyusun laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran merupakan rencana kerja suatu instansi termasuk pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah). Setiap pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya. Begitu juga pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Roviyantie (2011) “Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja

keuangannya kepada publik”. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu dan memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Syarat terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah berkualitas atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor yang pertama itu adalah Pengawasan Keuangan Daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh

mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya sistem pengendalian intern. Tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu kualitas sumber daya manusia. Menurut Roviyantje (2011) "Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi". Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga dengan entitas pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerinah keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah.

Faktor keempat yang mempengaruhi Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016), kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017 sampai 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK sedangkan, pada tahun 2015/2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan keadaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kabupaten Bangka Barat masih terdapat kelemahan dan kesalahan sehingga laporan keuangan yang disampaikan belum dapat disajikan dengan baik dan berkualitas. Kelemahan tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya pengaruh nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat terhadap pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2018. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan dengan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Oleh karena itu, peneliti beranggapan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap penelitian ini, yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasilnya akan berguna dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dari aspek ilmu maupun praktis.

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pengaruh pengawasan keuangan Daerah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. selain itu juga dapat, memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber referensi bagi akademis. Dosen, mahasiswa maupun peneliti yang akan datang.



## 2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran bagi Pemerintah Daerah, selain itu juga diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan pegawai maupun pihak-pihak yang ada didalamnya, agar bekerja secara lebih maksimal, transparan dan bijak.

## 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang pengaruh pengaruh pengawasan keuangan Daerah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ini akan dibagi dalam lima bab yakni sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi dalam pelaporan keuangan Pemerintahan Daerah yang digunakan penulis sebagai

landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan proposal ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, populasi penelitian, sample penelitian, jenis data, metode pengumpulan data serta definisi dari operasional variabel dan metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.